



---

## PENGARUH BEBAN PAJAK TANGGUHAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN KOMITE AUDIT SEBAGAI PEMODERASI

Tika Anggraini<sup>1)</sup>, Anny Widiasmara<sup>2)</sup>, Nik Amah<sup>3)</sup>

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas PGRI Madiun

Email: [tikaanggraini1043@gmail.com](mailto:tikaanggraini1043@gmail.com)<sup>1)</sup>, [anny.asmara@gmail.com](mailto:anny.asmara@gmail.com)<sup>2)</sup>,  
[sigmaku87@gmail.com](mailto:sigmaku87@gmail.com)<sup>3)</sup>

---

### Abstract

*This research aims to analyze the effect of Deferred Tax Expenses on Tax Avoidance and the Audit Committee as moderation. This research is a quantitative study, with tax avoidance as the dependent variable in this study. Tax avoidance is measured by a cash effective tax rate (CETR). Independent variables examined include Deferred Tax Expense, and the Audit Committee as moderation. The sample from this study were 8 Coal Mining sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2013-2017. Samples were selected using a non-probability sampling method. Data analysis was performed using descriptive statistical tests, classic assumption tests and hypothesis testing using linear regression methods. The results of this study indicate that the deferred tax burden affects tax avoidance. Whereas the Audit Committee moderates tax avoidance.*

**Keywords:** Mining, Coal Companies, Deferred Tax Burden, Audit Committee, Tax Avoidance.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak dan Komite Audit sebagai moderasi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan penghindaran pajak sebagai variabel dependen dalam penelitian ini. Penghindaran pajak diukur dengan cash effective tax rate (CETR). Variabel independen yang diteliti antara lain Beban Pajak Tangguhan, dan Komite Audit sebagai moderasi. Sampel dari penelitian ini adalah 8 perusahaan sektor Pertambangan Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013–2017. Sampel dipilih dengan metode *non probability sampling*. Analisis data dilakukan dengan uji Statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis dengan metode regresi linier. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan Komite Audit memoderasi terhadap penghindaran pajak.

**Kata Kunci:** Pertambangan, Perusahaan Batu Bara, Beban Pajak Tangguhan, Komite Audit, Penghindaran Pajak.

---

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu dari beberapa pendapatan Negara yang sangat besar. Pendapatan Negara terbesar ini harus lebih ditingkatkan agar laju pertumbuhan Negara dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan baik. Dengan demikian, diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya secara sukarela sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.

Salah satu penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak adalah *tax avoidance*, pada dasarnya menekan dan mengendalikan jumlah pajak serendah dan seminimum mungkin, sepanjang tidak menyalahi aturan yang ada. Akan tetapi praktik *tax avoidance* tidak selalu bisa dilakukan karena wajib pajak tidak selalu bisa menghindar dari fakta yang dikenakan dalam perpajakan. Penghindaran pajak (*tax*



*avoidance*) merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (*Lawful*) sedangkan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (*Unlawful*) (Xynas, 2011:45-62). "Penggelapan pajak adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat ilegal. Oleh karenanya persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, tapi di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan" (Budiman & Setiyono, 2012). Hanlon dan Heitzman (2010:127-128) "Mendefinisikan penghindaran pajak yaitu pengurangan pajak eksplisit yang merepresentasikan serangkaian strategi perencanaan pajak mulai dari manajemen pajak (*tax mangement*), perencanaan pajak (*tax planning*), pajak agresif (*tax aggressive*), *tax evasion* dan *tax sheltering*". Menurut Gusti Maya Sari (2014) "Penghindaran pajak adalah suatu skema transaksi yang ditunjukkan dengan meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan-ketentuan perpajakan suatu negara".

Beban pajak merupakan penjumlahan dari beban pajak kini dan beban (manfaat) tangguhan. Beban pajak tangguhan merupakan dampak dari perbedaan temporer yang menyebabkan jumlah pajak terpulihkan atau pajak penghasilan terhutang pada periode masa depan. Menurut Heny (2010) "Beban Pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (yaitu laba dalam laporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak)".

Definisi pajak tangguhan nomor 04 PSAK 46 adalah jumlah pajak penghasilan (PPh) yang dapat dipulihkan pada periode masa depan sebagai akibat adanya: perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, dan akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan.

Yenny Sucipto (2017), mengakui bahwa data penghindaran pajak dan penggelapan pajak sulit diakses oleh publik. Menurut Yenny, penggelapan pajak merupakan masalah serius di Indonesia. Diduga setiap tahun ada Rp110 triliun yang merupakan angka penghindaran pajak. Kebanyakan adalah badan usaha, sekitar 80 persen, sisanya adalah wajib pajak perorangan. "Kebanyakan memang badan usaha yang bergerak di sektor mineral dan batu bara. Kebanyakan juga adalah perusahaan asing. Ada juga perusahaan berbadan hukum Indonesia, tetapi kepemilikannya sebetulnya oleh asing. Berdasarkan hasil riset Perkumpulan Prakarsa, yang dipaparkan beberapa waktu lalu, selama kurun waktu 2010-2014, akumulasi aliran dana gelap dari Indonesia ke luar negeri mencapai Rp 914 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 45 persen pertambahan jumlah uang beredar dalam periode yang sama di Tanah Air yang jumlahnya Rp 2.032 triliun. Sementara, laporan Global Financial Integrity menyebutkan, dalam kurun 2004 – 2013, dana ilegal yang keluar dari Indonesia mencapai 180,71 miliar dollar AS atau setara Rp 2.100 triliun. Untuk urusan ini, Indonesia merupakan negara terbesar kesembilan di dunia. Indonesia hanya kalah dari China, Rusia, Meksiko, Malaysia, India, Brasil, Afrika Selatan, dan Thailand.(Suara.com: 30/11/2017)

"Fenomena lain penghindaran pajak sudah banyak terjadi di Indonesia. Mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo sebelum melepas jabatannya mengatakan,



ada ribuan perusahaan multinasional yang tidak menjalankan kewajibannya kepada negara. Agus Marto menyebut hampir 4.000 perusahaan tidak membayar pajaknya selama tujuh tahun. Di Indonesia, peningkatan pembayaran royalti ke perusahaan induk (*parent company*) berpotensi mengurangi PPh badan yang harus dibayar perusahaan. Terkait penghindaran pajak, di Amerika paling tidak terdapat seperempat dari jumlah perusahaan telah melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yakni dengan membayar pajak rata-rata 20% padahal pajak yang harusnya dibayarkan perusahaan mendekati 30%" (Dyrenge, 2010).

Pada tahun 2016, dunia dikejutkan oleh kebocoran dokumen finansial berskala luar biasa. Peristiwa tersebut merupakan kebocoran data terbesar di dunia yang berasal dari firma hukum Mossack Fonseca di atau disebut "*Panama Papers*". Istilah baru yang muncul dalam Panama Papers ialah "Perusahaan Cangkang" atau *shell corporation*. Perusahaan ini dapat disamakan sebagai *conduit company* atau *special purpose vehicle company* atau perusahaan boneka. PPATK mendefinisikan *shell corporation* sebagai perusahaan yang didirikan secara formal berdasarkan aturan hukum yang berlaku, namun tidak digunakan melakukan kegiatan usaha, melainkan melakukan transaksi fiktif maupun menyimpan aset pendirinya ataupun orang lain untuk menyamarkan kepemilikan sebenarnya terhadap aset tersebut. Dengan demikian, mereka dapat bertindak sebagai penghindar pajak (*tax avoidance*) untuk bisnis yang sah. (kompas.com: 2016/04/05).

"Komite audit merupakan komite yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang. Tugas dan fungsi komite audit adalah mengawasi tata kelola perusahaan dan mengawasi audit eksternal atas laporan keuangan perusahaan. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris sehingga komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris". "Komite audit juga digambarkan sebagai mekanisme monitoring yang dapat meningkatkan fungsi audit untuk pelaporan eksternal perusahaan. Para dewan perusahaan sering memberikan tanggung jawab kepada komite audit terhadap kesalahan pelaporan keuangan agar laporan keuangan dapat dipercaya (*relevant* dan *realialible*). Oleh karena itu komite audit dapat memonitoring mekanisme yang dapat memperbaiki kualitas informasi bagi pemilik perusahaan atau *Shareholders* dan manajemen perusahaan, karena kedua belah pihak tersebut memiliki level informasi yang berbeda" (Linda, Lilis dan Nuraini ,2011). Definisi komite audit menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) adalah "suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibantu oleh dewan komisaris dan dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris atau dewan pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan".

Kebijakan penghindaran pajak yang ada di perusahaan tentu saja merupakan keputusan yang diambil oleh pimpinan perusahaan itu sendiri, penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak secara legal, dan risiko yang dapat diambil dari kegiatan tersebut adalah di denda, dan buruknya



rekapitulasi perusahaan tersebut di hadapan publik, dapat digolongkan sebagai penggelapan pajak apabila penghindaran pajak melebihi atau melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku.

Mengenai dampak dari penerapan perencanaan pajak tersebut baik terhadap kinerja perusahaan dan kinerja saham di pasar modal maupun terhadap para *stakeholder* lainnya telah banyak pengkajian dan penelitian yang dilakukan. Perhatian penulis adalah penelitian perpajakan yang berhubungan dengan ketaatan pengelola perusahaan terhadap pembayaran pajak penghasilan perusahaan telah banyak penelitian yang dilakukan baik dalam maupun luar negeri, salah satu masalah yang sangat krusial dalam perusahaan adalah masalah pajak penghasilan, laba yang dihasilkan oleh perusahaan berkaitan langsung dengan pembayaran pajak penghasilan, laba adalah alat ukur keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan, indikator sentral, tujuan dan motivasi yang mendasari laporan adalah karena laba dilaporkan dan mungkin disesuaikan, dalam hal ini dapat disebut manajemen laba karena dalam melaporkan laba manajemen dapat memilih prinsip-prinsip akuntansi mana yang sesuai dengan motivasinya, pembedaan dari manajemen laba tersebut ada empat hal yaitu: meninggikan laba (*income increasing*), merendahkan laba (*income decreasing*), meratakan laba (*income smoothing*) dan mandi besar (*big bath*).

Dalam mengukur laba standard akuntansi keuangan telah mengatur dan menyediakan pilihan-pilihan tersebut sebagai pedoman, yang disebut laba akuntansi, fiskus menganut konsep laba ekonomi yang luas selain laba akuntansi, besar pajak penghasilan yang harus dibayarkan ke pemerintah dapat diukur menggunakan laba akuntansi maupun laba ekonomi. Penyebab perbedaan pajak itu timbul karena adanya dualisme dasar perhitungan yaitu pajak menurut fiskus dan pajak menurut perhitungan perusahaan. Suatu penghindaran pajak yang bersifat legal dan dapat dipandang sebagai usaha memperkecil pembayaran pajak secara tidak legal dapat dilihat dari peran perencanaan pajak sebagai alat dan sistem dalam mengatur perhitungan dan pembayaran pajak oleh manajemen.

Penelitian Kalbuana, Purwanti, dan Agustin (2017) "Penelitian ini bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, beban pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran pajak perusahaan sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, tingkat pajak efektif berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia".

Eksandy (2017) "Penelitian ini bahwa Komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak akuntansi dengan nilai signifikansi, komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dengan nilai signifikan, kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak akuntansi dengan nilai signifikan".

Andy (2018) "penelitian ini bahwa variabel *return on assets* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), bahwa besar dan kecilnya hutang dalam pembiayaan aktiva tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran



pajak, peningkatan aktiva akan memperkecil perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak tetapi penurunan aktiva memberikan peluang bagi perusahaan melakukan penghindaran pajak, Semakin besar perbedaan antara laba fiskal dengan laba akuntansi menunjukkan semakin besarnya diskresi manajemen. Besarnya diskresi manajemen tersebut akan terefleksikan dalam beban pajak tangguhan atau *deferred tax expense* dan mampu digunakan untuk mendeteksi praktik *tax avoidance* pada perusahaan".

Sarra (2017) "penelitian ini bahwa *Konservatisme* akuntansi berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, Komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, Dewan komisaris independen berpengaruh tidak signifikan terhadap *tax avoidance*, *konservatisme* akuntansi, komite audit dan dewan komisaris independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*".

### **Perumusan Masalah**

Adapun rumusan permasalahan yang dihasilkan berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas adalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh beban pajak tangguhan terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah komite audit mampu memoderasi beban pajak tangguhan terhadap penghindaran pajak?

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menguji pengaruh beban pajak tangguhan terhadap penghindaran pajak
2. Menguji komite audit dalam memoderasi pengaruh beban pajak tangguhan terhadap penghindaran pajak

## **KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESA**

### **Penghindaran Pajak**

Menurut Nur:2010 "Pengertian Penghindaran pajak adalah cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutangnya tanpa melanggar peraturan perpajakan atau dengan istilah lainnya mencari kelemahan peraturan". (Hutagaol, i2007). "Pengertian Penghindaran pajak adalah upaya efisiensi beban pajak yang harus dibayarkan dengan cara menghindari pengenaan pajak lewat berbagai jenis transaksi yang bukan merupakan objek pasar".

Hanlon dan Heitzmani (2010:127-128) "Mendefinisikan penghindaran pajak yaitu pengurangan pajak eksplisit yang merepresentasikan serangkaian strategi perencanaan pajak mulai dari manajemen pajak (*tax mangement*), perencanaan pajak (*tax planning*), pajak agresif (*tax aggressive*), *tax evasion* dan *tax sheltering*". Menurut Gusti Maya Sari (2014) "penghindaran pajak adalah suatu skema transaksi yang ditunjukan dengan meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan-ketentuan perpajakan suatu negara".





## **Beban Pajak Tangguhan**

Beban pajak merupakan penjumlahan dari beban pajak kini dan beban (manfaat) pajak tangguhan. Beban pajak tangguhan merupakan dampak dari perbedaan temporer yang menyebabkan jumlah pajak terpulihkan atau pajak penghasilan terhutang pada periode masa depan. Menurut Heny (2010) "Beban Pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (yaitu laba dalam laporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak)".

Definisi pajak tangguhan nomor 04 PSAK 46 adalah jumlah pajak penghasilan (PPh) yang dapat dipulihkan pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan.

## **Komite Audit**

Komite audit merupakan komite yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang. Tugas dan fungsi komite audit adalah mengawasi tata kelola perusahaan dan mengawasi audit eksternal atas laporan keuangan perusahaan. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris sehingga komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Komite audit juga digambarkan sebagai mekanisme monitoring yang dapat meningkatkan fungsi audit untuk pelaporan eksternal perusahaan. Para dewan perusahaan sering memberikan tanggung jawab kepada komite audit terhadap kesalahan pelaporan keuangan agar laporan keuangan dapat dipercaya (*relevant* dan *realialible*). "Oleh karena itu komite audit dapat memonitoring mekanisme yang dapat memperbaiki kualitas informasi bagi pemilik perusahaan atau *Shareholders* dan manajemen perusahaan, karena kedua belah pihak tersebut memiliki level informasi yang berbeda" (Linda, Lilis dan Nuraini ,2011). Definisi komite audit menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) adalah "suatu komite yang bekerja secara professional dan independen yang dibantu oleh dewan komisaris dan dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris atau dewan pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan".

## **Pengembangan Hipotesis**

### **Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak**

*Deferred method* (Metode Pajak Tangguhan) dalam metode ini menggunakan pendekatan laba rugi yang memandang perbedaan perlakuan antara akuntansi dan perpajakan dari sudut pandang laporan laba rugi, yaitu kapan suatu transaksi diakui dalam laporan laba rugi baik dari segi komersial maupun fiskal. Pendekatan ini mengenal istilah perbedaan waktu dan perbedaan permanen.



Penelitian, Kalbuana, Purwanti, dan Agustin (2015) menunjukkan Beban pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan Berdasarkan uraian diatas hipotesis yang bias dikembangkan adalah sebagai berikut :

H1: Beban Pajak Tangguhan mempunyai pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

## **Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak dengan Komite Audit**

*Deferred method* (Metode Pajak Tangguhan) dalam metode ini menggunakan pendekatan laba rugi yang memandang perbedaan perlakuan antara akuntansi dan perpajakan dari sudut pandang laporan laba rugi, yaitu kapan suatu transaksi diakui dalam laporan laba rugi baik dari segi komersial maupun fiskal. Pendekatan ini mengenal istilah perbedaan waktu dan perbedaan permanen. Hasil perhitungan dari pendekatan ini adalah pergerakan yang akan diakui sebagai pajak tangguhan pada laporan laba rugi.

Komite audit memiliki fungsi utama dalam pengawasan penyusunan laporan keuangan yang berintegritas, yaitu laporan keuangan yang jujur dan memenuhi prinsip standar akuntansi, yaitu standar akuntansi keuangan. Komite audit mendukung dewan komisaris dalam memantau penyusunan laporan keuangan, mekanisme pengendalian internal, dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Puspitaningrum, 2012).

Komite audit tidak hanya berperan penting dalam pemantauan tidak hanya berperan penting untuk menjamin kualitas pelaporan keuangan dan akuntabilitas perusahaan akan tetapi juga menentukan keefektifan dari pengendalian internal yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan dalam perusahaan (Zhang, 2006). Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dapat dikembangkan adalah:

H2: Komite Audit Mampu Memoderasi Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak

## **METODE PENELITIAN**

### **Populasi dan Sampel penelitian**

#### **1. Populasi**

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek atau objek yang memiliki karakter dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh seorang peneliti untuk dipelajari yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan batu bara yang berjumlah 21 perusahaan dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2013-2017.

#### **2. Sampel**

Sampel memiliki arti suatu bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pada penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan metode

*non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling* dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Perusahaan sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2013-2017.
2. Perusahaan yang terdaftar di BEI dan laporan keuangannya telah diaudit oleh akuntan publik sejumlah 8 dalam mata uang dolar, dikarenakan data yang menggunakan rupiah kurang mencukupi.

## Definisi dan Pengukuran Variabel

### Penghindaran Pajak

Pengertian Penghindaran pajak adalah upaya efisiensi beban pajak yang harus dibayarkan dengan cara menghindari pengenaan pajak lewat berbagai jenis transaksi yang bukan merupakan objek pasar (Nur 2010). Dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Pajak yang dibayarkan Perusahaan}}{\text{Laba (rugi) sebelum pajak}}$$

### Beban Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan adalah pajak yang kewajibannya ditunda sampai waktu yang ditentukan atau diperbolehkan. Pada dasarnya antara akuntansi pajak dan akuntansi keuangan memiliki kesamaan tujuan, yaitu untuk menetapkan hasil operasi bisnis dengan pengukuran dan rekognisi penghasilan dan biaya. Namun ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak sekadar instrumen penstransfer sumber daya (fungsi *budgeter*), akan tetapi seringkali pula digunakan untuk tujuan memengaruhi perilaku wajib pajak untuk investasi, kesejahteraan dan lain-lain (fungsi mengatur) yang kadang-kadang merupakan alasan untuk membenarkan penyimpangan dari standar akuntansi keuangan. Dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$DTE = \frac{\text{Beban Pajak Tangguhan}}{\text{Total Asset-I}}$$

### Komite Audit

Pengertian komite audit adalah umumnya komite audit itu terdiri dari tiga atau lima kadang tujuh orang yang bukan bagian dari manajemen perusahaan. Tujuan dibentuknya komite audit yaitu untuk menjadi penengah antara auditor dan manajemen perusahaan apabila terjadi perselisihan (Arens:2010). Dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$KA = \Sigma \text{ Anggota Komite Audit}$$



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam penelitian ini uji normalitas diuji menggunakan uji statistik non-pametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S), dimulai dengan membuat hipotesis:

"Jika nilai sig Kolmogorov-Smirnov  $< \alpha = 0,05$  maka  $H_0$  di tolak atau jika data tidak berdistribusi secara normal. Begitu pula sebaliknya jika nilai sig Kolmogorov-Smirnov  $> \alpha = 0,05$  maka  $H_0$  diterima atau berdistribusi normal" (Ghozali, 2013 : 160).

Uji normalitas merupakan salah satu bagian dari uji persyaratan analisis data atau uji asumsi klasik, artinya sebelum kita melakukan analisis statistik untuk uji hipotesis dalam hal ini adalah analisis regresi, maka data penelitian tersebut harus di uji kenormalan distribusinya.

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardize d Residual
N		40
Normal Parameters <sup>a,,b</sup>	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,67858634
Most Extreme Differences	Absolute	0,188
	Positive	0,155
	Negative	-0,188
Kolmogorov-Smirnov Z		1,191
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,117
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Berdasarkan *output* SPSS tersebut, diketahui bahwa nilai signifikansi *Asymp.Sig (2-tailed)* sebesar 0,117 lebih besar dari 0.05 maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji *kolomogorov-smirnov* dapat di simpulkan bahwa data di atas berdistribusi normal.

#### a. Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam persamaan regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Jika tidak terjadi korelasi antar variabel bebas berarti model regresi tersebut baik. Pengujian ini dengan bantuan aplikasi statistik pada *Collinearity Diagnostic* dengan hasil: jika nilai tolerance variabel independen  $\geq 0,10$  dan nilai VIF  $\leq 10$  menunjukkan bahwa tidak adanya multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi. Berikut hasil uji multikolonieritas dengan melihat nilai tolerance dan lawannya VIF:

Tabel Uji Multikolonieritas

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		Tolerance	VIF
1	DTE (X)	1,000	1,000

keterangan  
tidak terjadi multikolonieritas

a. Dependent Variable: CETR (Y)

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil perhitungan nilai tolerance menunjukkan tidak ada variabel yang memiliki tolerance kurang dari 0,10, hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antar variabel independen. Sedangkan hasil perhitungan nilai *Variance Inflation* Faktor (VIF) tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas antar variabel independen dalam regresi.

### Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengidentifikasi apakah dalam model regresi linier ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat dengan nilai uji Durbin-Watson (D-W).

Tabel Uji Autokorelas

Du	Durbin Watson	Kesimpulan
1,5444	1,696	Tidak terjadi autokorelasi

Dengan nilai tabel pada tingkat signifikansi 5%, jumlah data 40 ( $n$ ) dan jumlah variabel independen 1 ( $k=1$ ), maka dari tabel DurbinWatson akan didapatkan nilai batas atas ( $dU$ ) 1,5444. Durbin Watson (DW) terletak diantara  $dU$  dan  $4-dU$ . Nilai  $dU$  sebesar 1,5444 dan  $4-dU$  sebesar,  $4 - 1,5444 = 2,4556$  dan hasilnya diperoleh  $1,5444 < 1,696 < 2,4556$ . Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada model regresi ini.

### Uji Regresi Linier

Pengujian Regresi dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda. Teknik analisis regresi linier sederhana digunakan untuk menguji hipotesis pertama. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Sedangkan teknik analisis regresi berganda digunakan untuk menguji hipotesis kedua. Teknik analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan bantuan program statistik.

**Tabel Ringkasan Analisis Regresi sederhana**

Variabel	B	R Square	Thitung	Sig.
(Constant)	-0,500			
DTE (X)	16,210	0,132	2,399	0,021

### 1. Pengujian Hipotesis Pertama

Berdasarkan nilai R Square di atas di ketahui bahwa nilai R Square sebesar 0,132 sehingga dapat di katakan bahwa Beban Pajak Tangguhan (DTE) berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (CETR) sebesar 13,2%.

Pengujian berdasarkan nilai Sig. ditabel atas diketahui bahwa nilai Sig dari DTE (X) sebesar 0,021 karena nilai sig. < probabilitas sebesar 0,05 maka dapat di simpulkan bahwa  $H_0$  di tolak artinya terdapat pengaruh Beban Pajak Tangguhan (DTE) berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (CETR).

Pengujian berdasarkan  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$  tabel di atas di ketahui bahwa nilai  $t_{hitung} 2,399 > t_{tabel} 2.02439$  maka dapat di simpulkan bahwa  $H_0$  di tolak artinya terdapat pengaruh Beban Pajak Tangguhan (DTE) berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (CETR).

### 2. Pengujian Hipotesis Kedua

**Ringkasan Moderated Regression Analysis**

Variabel	Konfesien Regresi	R Square	F Hitung	Sig.
(Constant)	-1,283			
DTE (X)	18,117			
KA(Z)	0,179			
DTE X KA (X*Z)	-0,105	0,168	2,800	0,009

Berdasarkan nilai R Square setelah adanya variabel moderasi di ketahui bahwa nilai R Square sebesar 0,168 sehingga dapat di katakan bahwa variabel komite audit akan dapat meningkatkan pengaruh variabel Beban Pajak Tangguhan (DTE) terhadap Penghindaran Pajak (CETR) sebesar 16,8%.

Pengujian berdasarkan nilai Sig. ditabel atas diketahui bahwa nilai Sig. dari DTE (X) dan Komite Audit (Z) sebesar 0,009 karena nilai sig. < probabilitas sebesar 0,05 maka dapat di simpulkan bahwa  $H_0$  di tolak artinya variabel komite audit akan dapat meningkatkan pengaruh variabel Beban Pajak Tangguhan (DTE) terhadap Penghindaran Pajak (CETR).

Pengujian berdasarkan  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$  tabel di atas di ketahui bahwa nilai  $t_{hitung} 2,769 > t_{tabel} 2.02439$  maka dapat di simpulkan bahwa  $H_0$  di tolak artinya variabel komite audit akan dapat meningkatkan pengaruh variabel Beban Pajak Tangguhan (DTE) terhadap Penghindaran Pajak (CETR).



## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Beban Pajak Tangguhan Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak. Dapat Di Simpulkan Bahwa Masih Banyak Para Perusahaan Yang Menghindari Membayar Pajak Dikarenakan Beban Pajak Tangguhan Yang Dimiliki
2. Komite Audit Mampu Memoderasi Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak. Dapat Di Simpulkan Bahwa Variabel Komite Audit Akan Dapat Meningkatkan Pengaruh Variabel Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak.

### Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan serta keterbatasan penelitian di atas, maka penelitian ini memberikan saran sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan variabel independen yang di diduga berpengaruh dalam mendeteksi manajemen laba serta memasukkan faktor yang memotivasi manajer melakukan manajemen laba.
2. Penelitian selanjutnya hendaknya memperpanjang periode pengamatan dan memperbanyak jumlah sampel.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andy, A. (2018). PENGARUH RETURN ON ASSETS, DEBT TO EQUITY RATIO, DEBT TO ASSETS RATIO, UKURAN PERUSAHAAN DAN DEFERRED TAX EXPENSE TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Primanomics: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 16(2), 42-53.
- Asri, I. A. T. Y., & Suardana, K. A. (2016). Pengaruh proporsi komisaris independen, komite audit, preferensi risiko eksekutif dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajaK. *E-Jurnal Akuntansi*, 72-100.
- Budiman, J. (2012). *Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Cahyono, D. D., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris, ukuran perusahaan (Size), leverage (DER) dan profitabilitas (ROA) terhadap tindakan penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan perbankan yang listing BEI periode tahun 2011–2013. *Journal Of Accounting*, 2(2).
- Damayanti, F., & Susanto, T. (2015). Pengaruh komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional, risiko perusahaan dan return on assets terhadap tax avoidance. *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 5(2).
- Diantari, P. R., & Ulupui, I. A. (2016). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 702-732.



- Eksandy, A. (2017). Pengaruh komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak (tax avoidance)(studi empiris pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014). *Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 1-20.
- Ghozali, Imam, 2016. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hanlon, M. dan Heitzman, S. (2010) A review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics* 50, 127-128.
- Kalbuana, N., Purwanti, T., & Agustin, N. H. (2017). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Beban Pajak Tangguhan, Dan Tingkat Pajak Efektif Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia. *MAGISTRA*, 29(100).
- KIMSEN, K., EKSANDY, A., & ERISA, Y. (2019). PENGARUH RETURN ON ASSETS, KOMITE AUDIT DAN LEVERAGE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE)(Studi pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Perdagangan Besar yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012–2016). *Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(2), 1-12.
- Meiza, R. (2015). Pengaruh Karakteristik Good Corporate Governance Dan Deferred Tax Expense Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI tahun 2010-2013). *Jurnal Akuntansi*, 3(1).
- Puspita, D., & Febrianti, M. (2017). Faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 19(1), 38-46.
- Putranti, A. S., & Setiawanta, Y. (2015). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Struktur Dewan Komisaris, Kualitas Audit dan Komite Audit terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 8(2), 1-14.
- Sari, G. M. (2014). Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Struktur Kepemilikan terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2008-2012). *Jurnal Akuntansi*, 2(3)..
- Sari, N. A. (2018). *Pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap penghindaran pajak dengan CSR sebagai variabel pemoderasi: Studi pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Sarra, H. D. (2017). PENGARUH KONSERVATISME AKUNTANSI, KOMITE AUDIT DAN DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Empiris Pada Industri Kimia dan Logam di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014). *Competitive*, 1(1), 63-86.
- Swingly, C., & Sukartha, I. M. (2015). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Sales Growth Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 47-62.
- Vidiyanti, E. (2017). *Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Return On Assets, dan Leverage terhadap Tax Avoidance* (Doctoral dissertation, STIE PERBANAS SURABAYA).
- Xynas, L. (2011). Tax Planning, Avoidance and Evasion in Australia 1970-2010: The Regulatory Responses and Taxpayer Compliance. *Revenue Law Journal*, 20(1), 6714.